

Pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Malaka Barat)

Valerianus Bria^{1*}, Fitriana², Zaenal Aripin³

^{1,2,3}Faculty of Pascasarjana, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

Email: ¹fervallery11@gmail.com, ²fitriana@usbykp.ac.id, ³zaenal.arifin@usbykp.ac.id

Abstract

Village fund management in Indonesia still faces serious challenges due to high levels of fraud, including corruption, fraudulent statement, and asset misappropriation. This situation requires more effective prevention systems based on transparency, accountability, and digitalization. This study aims to examine the influence of Financial Reporting Compliance, Information Technology Utilization, and Internal Control on Fraud Prevention in Village Fund Management. The research was conducted in Malaka Barat District using a quantitative approach and Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). A total of 96 respondents, consisting of village heads and village officials from 12 villages, were selected through purposive sampling, based on their active involvement in managing village funds. The findings reveal that Financial Reporting Compliance and Information Technology Utilization significantly affect Fraud Prevention, while Internal Control does not show a statistically significant effect. Nevertheless, the effect size (f^2) indicates that Internal Control contributes moderately at a structural level. These results suggest that reporting practices and digitalization serve as key drivers in building an effective fraud prevention system within village governance. This study contributes theoretically to the development of fraud prevention models in the public sector and offers practical recommendations for village governments to strengthen reporting mechanisms and optimize the use of information technology.

Keywords: Financial Reporting Compliance, Information Technology, Internal Control, Fraud Prevention, SEM-PLS.

Abstrak

Pengelolaan dana desa di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya kasus *fraud*, seperti korupsi, penggelapan, dan manipulasi laporan keuangan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pencegahan yang lebih efektif berbasis transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Malaka Barat dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Sampel 96 responden, terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dari 12 desa, dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan Laporan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, sedangkan Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan. Namun, nilai (f^2) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal tergolong sedang secara struktural. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek pelaporan dan digitalisasi kunci utama membangun sistem pengawasan dana desa yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pencegahan *fraud* di sektor publik, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: Kepatuhan Laporan Keuangan, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pencegahan *Fraud*, SEM-PLS.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai bentuk *fraud* seperti *fraudulent statement*, *asset misappropriation*, dan *corruption* terus terjadi, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih efektif. Agar dana desa dapat dikelola dengan baik, prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi harus diterapkan secara konsisten. Beberapa strategi pencegahan *fraud* dapat diterapkan, antara lain memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaporan keuangan, dan memanfaatkan teknologi informasi. Ketiga faktor tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan diverifikasi secara empiris untuk mengetahui keterkaitannya dengan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan pengelolaan dana desa lebih aman dan terhindar dari *fraud* [1].

Tingginya kasus *fraud* yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik RI dalam Laporan Statistik Kriminal Tahun 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama periode 2022–2023. Diketahui penipuan mencapai 48.609 kejadian pada tahun 2023, meningkat signifikan dari 34.578 kejadian pada tahun 2022, menjadikannya jenis kejahatan terbesar. Kasus penggelapan mengalami lonjakan tajam, dari 11.689 kejadian pada 2022 menjadi 27.049 kejadian pada 2023. Situasi serupa juga terjadi pada korupsi, dengan jumlah kasus meningkat dari 261 pada 2022 menjadi 483 pada 2023. Temuan ICW dalam laporan tahun 2023, mengungkapkan bahwa sektor desa menjadi wilayah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak, mencapai 187 kasus dengan 294 tersangka sepanjang tahun 2023. Sementara itu, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa *fraud* dana desa terus meningkat, dengan total kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun pada tahun 2024.

Tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Malaka sebagaimana dalam laporan Statistik Potensi Desa Kabupaten Malaka 2024, menunjukkan berbagai pola kejahatan *fraud* yang menjadi perhatian utama. Korupsi sering terjadi dalam pengelolaan dana publik, sementara penipuan/penggelapan mencakup berbagai modus seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan keuangan, dan manipulasi administrasi. Berikut tabel tingkat kasus berdasarkan kecamatan:

Tabel 1.1 Tingkat Kasus Korupsi & Penipuan/Penggelapan di Kab. Malaka 2024

KECAMATAN	JUMLAH KORUPSI	JUMLAH PENIPUAN/ PENGGELOPAN
Malaka Barat	11	2
Malaka Tengah	9	2
Wewiku	7	1
Rinhat	6	3
Malaka Timur	5	2
Kobalima	5	1
Weliman	5	1
Io Kufeu	4	2
Sasitamean	4	1
Botin Leobebe	4	2
Kobalima Timur	3	2
Laenmanen	2	-
Total	65	19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka (2025)

Dari tabel ini, terlihat bahwa Malaka Barat di tahun 2024, memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi (11 kasus), sedangkan jumlah penipuan/penggelapan lebih tersebar merata dengan angka tertinggi di Rinhat (3 kasus). Hal ini bisa menjelaskan bahwa korupsi lebih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Malaka Barat dengan lebih banyak aktivitas pemerintahan atau proyek publik, sedangkan kasus penipuan/penggelapan lebih berkaitan dengan individu.

Pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan *fraud*. Pemerintah Kecamatan Malaka Barat menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut [2]. Berikut merupakan gambaran mengenai kesenjangan pencegahan *fraud* yang terjadi di pemerintahan desa di Kecamatan Malaka Barat:

Tabel 1.2 Kesenjangan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Kecamatan Malaka Barat Tahun 2024 - April 2025

FAKTOR	KONDISI DI PEMERINTAH KECAMATAN MALAKA BARAT	DAMPAK TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD	SUMBER & TAHUN DATA
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Akses internet sudah tersedia, tetapi desa belum memiliki <i>website</i> sebagai alat transparansi keuangan dan Sistem Siskeudes masih berbasis <i>offline</i> .	Tanpa sistem <i>online</i> , akses informasi keuangan tidak optimal, meningkatkan risiko manipulasi data.	BPS Kabupaten Malaka (2024)
Kepatuhan Laporan Keuangan	Hingga 24 April 2025, dari 16 desa, hanya 1 desa yang telah menyampaikan SPJ 2024, sementara 15 desa lainnya belum memenuhi kewajiban pelaporan.	Keterlambatan pelaporan berpotensi ada peluang <i>fraud</i> anggaran dan melemahkan pengawasan.	Surat Edaran Dinas Keuangan Daerah Kab. Malaka Nomor BPKPD.900/127/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
Pengendalian Internal	Tidak ada mekanisme verifikasi dokumen yang ketat, seperti dalam kasus penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Desa Maktihan.	Tanpa pengawasan administratif yang baik, peluang manipulasi identitas, jabatan hingga maladministrasi pertanggungjawaban keuangan semakin besar	Media Online Radar Malaka, (2025).

Tabel diatas menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Malaka Barat dalam mencegah *fraud*. Berbagai faktor yang ada turut memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Agar dana desa dapat dikelola dengan lebih baik, perlu adanya perbaikan sistem teknologi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.

Situasi ini semakin memperjelas pentingnya upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Beberapa faktor utama yang memperbesar risiko *fraud* antara lain terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan keuangan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kurangnya optimalisasi teknologi dalam tata kelola keuangan desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemanfaatan teknologi yang lebih baik, peningkatan kepatuhan, serta penguatan mekanisme pengendalian internal menjadi langkah penting dalam mencegah *fraud* dan menjaga integritas pengelolaan dana desa [3].

Dalam penelitian ini, gap teori yang dikritisi adalah *fraud hexagon* oleh Georgios L. Vousinas (2016). Gap dalam teori ini adalah kurangnya pembahasan mengenai peran teknologi informasi dalam mengurangi *fraud*. Jika pengelolaan dana desa lebih transparan, seperti melalui implementasi sistem keuangan desa berbasis online dan website desa, maka aparat desa akan lebih sulit melakukan manipulasi karena data bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi gap dalam *fraud hexagon* dengan mengusulkan teknologi informasi sebagai alat pencegahan *fraud*. Dengan adanya transparansi digital dan pengawasan berbasis teknologi, risiko kolusi dan penyalahgunaan kewenangan bisa dikurangi, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel.

Hasil kajian empiris menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaruh kepatuhan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Saida [4] dan Akhyaar [5] menemukan bahwa KLK dan SPI berpengaruh positif, sementara Sulistiyantoro & Zahara [6] serta Putra [7] menekankan bahwa efektivitas SPI bergantung pada faktor moralitas dan budaya organisasi. Putri [8] dan Susanto [9] mendukung peran pemanfaatan TI, namun menunjukkan bahwa dampaknya sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM. Sementara itu, Rachman & Biduri [10], Wahyudi [11], Alfintia [12]. Selain itu juga, pada studi literatur oleh Bria [13] menemukan bahwa dari 22 jurnal terindeks SINTA, sebagian besar menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan dalam pencegahan *fraud*, tetapi beberapa penelitian lain justru menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penelitian terkait pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* berbasis *Partial Least Squares (PLS-SEM)* untuk meningkatkan akurasi analisis pengaruh antara kepatuhan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan regresi linear berganda karena tetap dapat digunakan meskipun data tidak selalu memenuhi asumsi distribusi normal. Dilain sisi, *PLS-SEM* juga memungkinkan pengukuran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antara variabel penelitian dan memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif terhadap determinasi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Malaka Barat)”. maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual kepatuhan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal pengelolaan dana desa di Kecamatan Malaka Barat?
2. Seberapa besar kepatuhan laporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Seberapa besar pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan kombinasi pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2017) [14], penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual, sedangkan penelitian verifikatif bertujuan menguji hubungan antar variabel secara empiris. Dalam penelitian ini, Pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk memetakan secara faktual kondisi terkait kepatuhan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, serta efektivitas pengendalian internal pengelolaan dana desa di Kecamatan Malaka Barat. Metode ini, peneliti mengidentifikasi karakteristik masing-masing kontruk dan pola yang muncul dari fenomena yang sedang berlangsung sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antar kontruk, baik secara parsial maupun simultan. Fokus utama pada analisis pengaruh dari kepatuhan pelaporan keuangan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y). Menerapkan pendekatan kuantitatif, berorientasi pada pengolahan data numerik dan penerapan teknik statistik menguji hubungan antar kontruk. Model analisis yang digunakan adalah *SEM-PLS*, dengan dukungan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi arah dan intensitas hubungan antar konstruk dalam model secara empiris. SmartPLS sebagai alat statistik yang efektif untuk menguji pengaruh antar konstruk, baik secara terpisah maupun bersamaan, tanpa bergantung asumsi distribusi normal. Metode ini sangat sesuai untuk analisis model kompleks, jumlah sampel terbatas, dan data yang bersifat non-parametri. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan Kualitatif. Menurut Supriadi (2022:28), kuantitatif melalui pengukuran indikator masing-masing variabel penelitian. Sebelum dilakukan analisis statistik, data ini harus memenuhi kriteria pengujian tertentu. Apabila belum memenuhi syarat, maka diperlukan pengujian asumsi untuk memastikan validitas analisis lanjutan dan kualitatif berasal dari respons kuesioner kemudian dikonversi dalam bentuk angka sesuai skala pengukuran yang digunakan. Misalnya, skala nominal diberi kode numerik seperti 0 dan 1, sedangkan skala ordinal diberi bobot antara 1 hingga 5, tergantung tingkat pengukuran. Data kualitatif yang dikodekan secara numerik dianalisis secara statistik setelah melalui tahapan pengujian asumsi. Sementara itu, data kualitatif yang tidak dianalisis secara statistik tetap dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap interpretasi hasil dan pembahasan penelitian [15].

Populasi penelitian mencakup seluruh individu yang menjadi fokus analisis, yaitu perangkat desa yang berperan aktif pengelolaan dana desa di Kecamatan Malaka Barat. Berdasarkan informasi, jumlah populasi yang teridentifikasi 128 orang, terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, serta Kepala Seksi tersebar di 16 desa administratif, rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Nama Desa pada wilayah Kecamatan Malaka Barat 2025

NAMA DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA
Motaulun	8
Naas	8
Maktihan	8
Besikama	8
Lasaen	8
Oanmane	8
Sikun	8
Fafoe	8
Umatoos	8
Umalor	8
Raimataus	8
Rabasahain	8
Rabasa Haerain	8
Rabasa	8
Loofoun	8
Motaain	8
Total	128

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka (2025)

Sampel penelitian ditentukan sebagai representasi populasi aparatur desa dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik peran dan keterlibatan dalam pengelolaan dana desa. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi 5% ($e = 0,05$), dari populasi 128 aparatur desa diperoleh 96 responden. Perhitungan Margin of Error (MoE) menunjukkan tingkat kesalahan sekitar $\pm 9,9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perhitungan tersebut, sampel diambil dari 12 desa (dari total 16 desa) dengan mempertimbangkan keterpenuhan kriteria dan variasi jabatan perangkat desa, sehingga distribusi responden lebih akurat dan relevan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Malaka Barat, berikut tabel penyebarannya:

Tabel 2.2 Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Jabatan Aparatur Desa

JABATAN APARATUR DESA	JUMLAH RESPONDEN (N)	PERSENTASE (%)
Kepala Desa	12	12,5%
Sekretaris Desa	12	12,5%
Bendahara/Kaur Keuangan	12	12,5%
Kaur Perencanaan	12	12,5%
Kaur TU & Umum	12	12,5%
Kasi Kesejahteraan	12	12,5%
Kasi Pelayanan	12	12,5%
Kasi Pemerintahan	12	12,5%
Total	96	100%

Sumber: Hasil Perhitungan MoE dan Slovin (2025)

Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, di mana responden diminta memberikan jawaban atas sejumlah pernyataan yang telah dirancang sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Penyusunan kuesioner didasarkan pada definisi operasional dari empat konstruk dalam penelitian ini, yaitu: Pencegahan *Fraud* (Y), Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3). Instrumen terdiri atas 15 item pernyataan tertutup yang menggunakan skala ordinal lima tingkat untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap masing-masing pernyataan. Distribusi kuesioner dilakukan melalui dua jalur: secara langsung kepada aparatur desa, dan secara daring melalui tautan *Google Form* yang dibagikan melalui komunikasi personal maupun grup *WhatsApp* kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui validitas dan reliabilitas untuk memastikan akurasi serta konsistensi pengukuran konstruk. Uji validitas konstruk dilakukan dengan menilai validitas konvergen melalui nilai outer loading ($>0,70$) dan AVE ($>0,50$), serta validitas diskriminan dengan membandingkan akar kuadrat AVE terhadap korelasi antar konstruk dan analisis cross-loading. Reliabilitas konstruk diuji menggunakan Cronbach's Alpha ($>0,60$) dan Composite Reliability ($>0,70$) untuk menilai konsistensi internal. Selain itu, validitas isi diperoleh melalui expert judgment dari dosen pembimbing dan praktisi desa guna memastikan relevansi item dengan konteks penelitian. Instrumen juga diuji coba (pretest) pada responden di luar sampel

utama untuk mengidentifikasi pertanyaan yang ambigu atau tidak relevan, sehingga hasil uji coba digunakan untuk menyempurnakan kuesioner sebelum distribusi utama. Rancangan analisis dan uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual dari setiap konstruk, seperti kepatuhan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas pengendalian internal, serta pencegahan *fraud*, dengan perhitungan rata-rata skor indikator dan konstruk yang kemudian dikategorikan berdasarkan skala Likert. Sementara itu, analisis verifikatif dilakukan menggunakan metode SEM-PLS dengan tahapan evaluasi outer model (validitas dan reliabilitas indikator) serta inner model (uji koefisien jalur, R^2 , f^2 , dan Q^2), dilanjutkan dengan uji hipotesis melalui nilai t-statistik dan p-value, serta uji simultan (uji F) untuk menilai pengaruh kolektif konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Pendekatan ini memungkinkan pengujian empiris baik secara parsial maupun simultan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh sekaligus menguji hubungan antar variabel secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil responden menunjukkan mayoritas berjenis kelamin perempuan (56,25%), dengan masa jabatan rata-rata tiga tahun, serta tingkat pendidikan cukup tinggi karena lebih dari separuh merupakan lulusan S1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian berada pada kategori *Sangat Tinggi*. Kepatuhan laporan keuangan (X1) memperoleh skor rata-rata 4,69, pemanfaatan teknologi informasi (X2) 4,65, pengendalian internal (X3) 4,63, dan pencegahan *fraud* (Y) 4,71. Angka-angka ini menegaskan bahwa aparatur desa di Kecamatan Malaka Barat memiliki tingkat kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Secara verifikatif, kepatuhan laporan keuangan (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien jalur $\beta = 0,338$, t-statistik = 3,761, p-value = 0,000, dan effect size $f^2 = 0,174$.

Temuan ini mendukung *Agency Theory* oleh Jensen & Meckling [16] dan teori akuntabilitas publik dari Halim & Abdullah, yang menekankan bahwa kepatuhan pelaporan mampu mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan aparatur desa. Secara empiris, hasil ini konsisten dengan Saida dan Kivaayatul Akhyaar, meskipun berbeda dengan Putri & Kisnawati yang menemukan pengaruh tidak signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi (X2) muncul sebagai faktor paling dominan dengan koefisien jalur $\beta = 0,960$, t-statistik = 3,713, p-value = 0,000, dan $f^2 = 0,654$. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan TI dapat meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* hingga 96%. Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* [17] yang menekankan aspek *perceived usefulness*, serta diperkuat oleh studi Scherer [18] dan Romney & Steinbart [19] yang menegaskan bahwa sistem digital memperkuat integritas data dan mempercepat deteksi *fraud*.

Sebaliknya, pengendalian internal (X3) menunjukkan arah pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan $\beta = -0,351$, t-statistik = 1,484, p-value = 0,138, dan $f^2 = 0,156$. Walaupun skor deskriptifnya tinggi, kelemahan pada aspek SOP, audit internal, dan sistem pelaporan pelanggaran membuat pengendalian internal tidak berfungsi optimal. Temuan ini bertentangan dengan *COSO Framework* dan pendapat Mulyadi, serta konsisten dengan studi Rachman & Biduri yang menyatakan bahwa pengendalian internal administratif semata tidak cukup untuk mencegah *fraud*.

Secara simultan, ketiga konstruk (X1, X2, X3) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan F-statistik = 177,377, p-value = 0,000, $R^2 = 0,918$, dan $Q^2 = 0,750$. Artinya, 91,8% variasi pencegahan *fraud* dapat dijelaskan oleh kombinasi kepatuhan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal. Temuan ini mendukung pendekatan sistemik dalam tata kelola keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Dengan kekuatan prediktif yang sangat tinggi, model penelitian ini relevan dijadikan dasar kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Malaka Barat memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kepatuhan terhadap laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti menjadi faktor utama yang memperkuat upaya pencegahan *fraud*, dengan teknologi informasi

muncul sebagai penggerak paling dominan. Sebaliknya, pengendalian internal meskipun dinilai baik secara persepsi, belum mampu memberikan pengaruh nyata sehingga perlu diperkuat melalui sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kombinasi kepatuhan pelaporan dan digitalisasi adalah kunci dalam membangun tata kelola keuangan desa yang lebih bersih, transparan, dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki mekanisme pengawasan internal, memperkuat budaya pelaporan, serta memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa.

REFERENCES

- [1] D. N. Rahmatika, *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris*. Sleman: Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- [2] Badan Pusat Statistik, "statistik-kriminal-2024," Jakarta, 2025. Accessed: Nov. 02, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024>
- [3] Y. Mutia Basri, "Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon," *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2020.
- [4] S. Saida, D. Diah Fakhriyyah, P. Studi Akuntansi, F. Ekonomi dan Bisnis, and U. Islam Malang, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan)," 2023. [Online]. Available: <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- [5] Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, and Wahyu Anggit Prasetya, "PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 2, pp. 202–217, Jan. 2022, doi: 10.22225/kr.13.2.2022.202-217.
- [6] "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Lnformasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 185–199".
- [7] I. M. Y. D. Putra, N. K. Rasmini, G. Gayatri, and N. M. D. Ratnadi, "Organizational culture as moderating the influence of internal control and community participation on fraud prevention in village fund management during the COVID-19 pandemic," *Linguistics and Culture Review*, vol. 6, pp. 351–362, Dec. 2021, doi: 10.21744/lingcure.v6ns1.2050.
- [8] N. A. Putri, M. Mudrifah, D. Irawan, and A. P. N. Wicaksono, "Fraud Prevention in Village Fund Managemant," *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 8, no. 2, pp. 140–151, Jun. 2024, doi: 10.30741/assets.v8i2.1246.
- [9] M. Iqbal, "Fraud Prevention Efforts In Managing Village Funds In Accordance With Aspects of Human Resource Management with Transparency Principles," 2022.
- [10] D. S. Rachman and S. Biduri, "Pencegahan fraud di era digital," vol. 16, no. 2, pp. 392–401, 2023.
- [11] S. Wahyudi, T. Achmad, and I. D. Pamungkas, "Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable," *Economies*, vol. 10, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/economies10010026.
- [12] S. Rizky Alfintia and E. S. Fathmaningrum, "DETERMINANT OF FRAUD IN VILLAGE FUNDS: HEXAGON FRAUD ANALYSIS AND GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE," vol. 4, 2024.
- [13] V. Bria, A. D. Iskandarsyah, W. Marpaung, R. A. Santoso, and F. Fitriana, "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, pp. 16285–16302, 2024.
- [14] N. D. Rizkia et al., *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=xQ_qEAAQBAJ

- [15] I. Supriadi, R. Abadi, and R. U. Maghfiroh, *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Jejak Pustaka, 2023. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=tFrHEAAQBAJ>
- [16] M. C. Jensen *et al.*, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," Harvard University Press, 1976. [Online]. Available: <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- [17] F. D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *Management Information Systems Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, Sep. 1989, doi: 10.2307/249008.
- [18] R. Scherer, F. Siddiq, and J. Tondeur, "The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education," *Comput. Educ.*, vol. 128, pp. 13–35, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009>.
- [19] M. B. Romney and P. J. Steinbart, *Accounting Information Systems*. Pearson Education, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=pe70DQAAQBAJ>